



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI PINANG**

TRIWULAN IV

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Triwulan merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja triwulan IV yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala SKPD dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengukuran kinerja triwulan merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar pada triwulan berikutnya, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

Sungai Pinang, 02 Januari 2025

Camat Sungai Pinang,



Marwata, SE

NIP. 19690217 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. LATAR BELAKANG 1

 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 2

 1.3. DASAR HUKUM 2

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 4

 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 4

BAB III 8

AKUNTABILITAS KINERJA..... 8

 1. Capaian Kinerja Organisasi..... 8

 2. Capaian Sasaran Kinerja..... 11

 Sasaran kinerja dengan target kinerja yang tercapai : 11

 Sasaran kinerja dengan target kinerja yang tidak tercapai : 16

 3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat..... 17

 4. Rekomendasi Triwulan IV 22

 5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA..... 23

BAB IV..... 24

PENUTUP..... 24

 Kesimpulan 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen SKPD dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.
2. Memberi gambaran tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Sungai Pinang.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang dijabarkan pada Perjanjian Kinerja dan kemudian disusun dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab pada instansi pemerintah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan dan pada rencana aksi ditetapkan capaian kinerja pertriwulan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, sasaran strategis dan indikator kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dijabarkan dari sasaran indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD Tahun 2024.

Tabel 21
Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Sungai Pinang
Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	-	Nilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.610.280,40	Camat
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja Intern (IKKI) Kec. Sungai Pinang	74	74	Indeks	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.344.088,048	Sekretaris Kecamatan
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	Persentase	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.039.500	Kasubbag Perenkeu
4	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	Persentase	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.843.224.928	Kasubbag Perenkeu
5	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	Persentase	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.648.800	Kasubbag Perenkeu
6	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi	100	100	Persentase	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.770.000	Kasubbag Umpeg

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	Persentase	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.175.800	Kasubbag Umpeg
8	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100	100	Persentase	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.114.000	Kasubbag Umpeg
9	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	Persentase	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.028.920	Kasubbag Umpeg
10	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	Persentase	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.010.000	Kasubbag Umpeg
11	Terselenggaranya Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	-	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.503.400	Kasi Kessos
12	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100	100	Persentase	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.201.000	Kasi Kessos
13	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan	100	100	Persentase	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.723.500	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulanan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100	100	Persentase	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.881.900	Kasi Trantib
15	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	Persentase	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.773.000	Kasi Trantib
16	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	151.339.500	Kasi Pemerintahan
17	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	Persentase	Fasilitasi Rekomendasi, Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.397.700	Kasi Pemerintahan
18	Terpeiharanya Barang Milik Daerah	Memelihara Kondisi Kendaraan dan Mencatat Kondisi Kendaraan Pada Buku Pemeliharaan Sesuai Ketentuan Agar Tertib Administrasi	12	-	Laporan	-	-	Pengemudi
19	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	-	Persentase	-	-	JF Perencana Ahli Pertama

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang memiliki 1 Sasaran Strategis yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan Indikator Kinerja adalah Nilai Evaluasi Kecamatan, terdiri dari 6 program 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan

1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk indikator sasaran yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan belum dilakukan penilaian oleh tim sehingga belum bisa ditampilkan pada laporan ini. Adapun untuk target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja TW IV

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan IV	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	Nilai	96,67	126%	0	Camat
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	76	Indeks	77,32	102%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Kecamatan
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
4	Perencanaan dan penganggran perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100%	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
5	Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	100%	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
7	Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang	12	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Perenkeu
8	Penatalaksanaan verifikasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan /Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	100%	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kasubbag Perenkeu
9	Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100%	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kasubbag Perenkeu
10	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
11	Penatausahaan BMD perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	4	Laporan	4	100%	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kasubbag Perenkeu
12	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg
13	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	0	0%	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kasubbag Umpeg
14	ASN yang meningkat kompetensinya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	0	Orang	0	0%	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang0Undangan	Kasubbag Umpeg
15	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg
16	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubbag Umpeg
17	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	3	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kasubbag Umpeg
18	Kunjungan tamu yang terfasilitasi	Difasilitasi kegiatan kunjungan tamu	0	Laporan	0	0%	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kasubbag Umpeg

19	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	Laporan	12	240%	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umpeg
20	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umpeg
21	Pengadaan peralatan mebelair sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah sarana dan prasarana Mebelair sesuai dengan kebutuhan	0	Unit	0	0%	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kasubbag Umpeg
22	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	Unit	4	100%	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umpeg
23	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umpeg
24	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	1	100%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubbag Umpeg
25	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umpeg
26	Terlaksananya pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	12	400%	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umpeg
27	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	Unit	1	100%	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umpeg
28	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100%	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubbag Umpeg
29	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan bidang sosial kemasyarakatan	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Kessos
30	Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	2	200%	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Kessos
31	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40	Persentase	50	125%	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Kessos
32	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	4	100%	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Kessos
33	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25	Persentase	25	100%	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi PM
34	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga kemasyarakatan	5	250%	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kasi PM
35	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	2	200%	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi PM
36	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib
37	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	1	0%	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib
38	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	2	200%	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kasi Trantib
39	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	75	Persentase	25	33%	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kasi Trantib
40	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang0Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	2	20000%	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang0Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kasi Trantib
41	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi PEM
42	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang0Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Terlaksana	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang0Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	Orang	0	0%	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang0Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasi PEM
44	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	Persentase	50	100%	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi PEM
45	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	100%	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kasi PEM

46	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	0	0%	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kasi PEM
47	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Kegiatan	0	0%	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kasi PEM
48	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	Kegiatan	0	0%	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kasi PEM
49	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan Kerjasama Antardesa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga yang di Fasilitasi	0	Kegiatan	0	0%	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kasi PEM
50	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Kegiatan	0	0%	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kasi PEM

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Capaian Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja dengan target kinerja yang tercapai :

1. Sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, target 77% realisasi 96,67% dengan capaian kinerja 126%, yaitu pada Nilai Evaluasi Kecamatan;
2. Sasaran kinerja Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, target 76% realisasi 77,32% dengan capaian kinerja 102%, yaitu pada Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan;
3. Sasaran kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Sasaran kinerja Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang berkualitas, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
5. Sasaran kinerja Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas, target 2 Laporan realisasi 2 Laporan dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
6. Sasaran kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
7. Sasaran kinerja Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, target 12 Orang realisasi 12 Orang dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
8. Sasaran kinerja Penatalaksanaan verifikasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas, target 12 Dokumen realisasi 12 Dokumen dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

9. Sasaran kinerja Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah yang berkualitas, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
10. Sasaran kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
11. Sasaran kinerja Penatausahaan BMD perangkat Daerah yang berkualitas, target 4 Laporan realisasi 4 Laporan dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
12. Sasaran kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
13. Sasaran kinerja ASN yang meningkat kompetensinya, target 0 Orang realisasi 0 Orang dengan capaian kinerja 0%, yaitu pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
14. Sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
15. Sasaran kinerja Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia, target 1 Paket realisasi 1 Paket dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
16. Sasaran kinerja Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia, target 3 Paket realisasi 3 Paket dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
17. Sasaran kinerja Kunjungan tamu yang terfasilitasi, target 0 Laporan realisasi 0 Laporan dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
18. Sasaran kinerja Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi, target 5 Laporan realisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja 240%, yaitu pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

19. Sasaran kinerja Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
20. Sasaran kinerja Pengadaan peralatan mebel sesuai dengan rencana kebutuhan, target 0 Unit realisasi 0 Unit dengan capaian kinerja 0 %, yaitu pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
21. Sasaran kinerja Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan, target 4 Unit realisasi 4 Unit dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
22. Sasaran kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100 %, yaitu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
23. Sasaran kinerja Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
24. Sasaran kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
25. Sasaran kinerja Terlaksananya pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan, target 3 Unit realisasi 12 Unit dengan capaian kinerja 400%, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
26. Sasaran kinerja Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, target 1 Unit realisasi 1 Unit dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
27. Sasaran kinerja Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, target 1 Unit realisasi 1 Unit dengan capaian kinerja 100 %, yaitu pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
28. Sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

29. Sasaran kinerja Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana, target 1 Laporan realisasi 2 Laporan dengan capaian kinerja 200%, yaitu pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
30. Sasaran kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, target 40% realisasi 50% dengan capaian kinerja 125%, yaitu pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
31. Sasaran kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, target 4 Laporan realisasi 4 Laporan dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
32. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, target 25% realisasi 25% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
33. Sasaran kinerja Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, target 2 Lembaga kemasyarakatan realisasi 5 Lembaga kemasyarakatan dengan capaian kinerja 250%, yaitu pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
34. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, target 1 Laporan realisasi 1 Laporan dengan capaian kinerja 200%, yaitu pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
35. Sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36. Sasaran kinerja Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Yang Terlaksana, target 0

Laporan realisasi 1 Laporan dengan capaian kinerja 0%, yaitu pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

37. Sasaran kinerja Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Terlaksana, target 1 Laporan realisasi 2 Laporan dengan capaian kinerja 200%, yaitu pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
38. Sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Terlaksana, target 1 Laporan realisasi 2 Laporan dengan capaian kinerja 200%, yaitu pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
39. Sasaran kinerja Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
40. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan, target 25% realisasi 25% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
41. Sasaran kinerja Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Terlaksana, target 0 Orang realisasi 0 Orang dengan capaian kinerja 0%, yaitu pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
42. Sasaran kinerja Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, target 50% realisasi 50% dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
43. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen dengan capaian kinerja 100%, yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

44. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, target 0 Kegiatan realisasi 0 Kegiatan dengan capaian kinerja 0%, yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
45. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, target 0 Kegiatan realisasi 0 Kegiatan dengan capaian kinerja 0%, yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;

Sasaran kinerja dengan target kinerja yang tidak tercapai :

1. Sasaran kinerja Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, target 2 Dokumen realisasi 0 Dokumen dengan capaian kinerja 0 % (target tidak tercapai), yaitu pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
2. Sasaran kinerja Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, target 75% realisasi 25% dengan capaian kinerja 33% (target tidak tercapai), yaitu pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, target 1 Dokumen realisasi 0 Dokumen dengan capaian kinerja 0% (target tidak tercapai), yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
4. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, target 1 Kegiatan realisasi 0 Kegiatan dengan capaian kinerja 0% (target tidak tercapai), yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
5. Sasaran kinerja Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, target 1 Kegiatan realisasi 0 Kegiatan dengan capaian kinerja 0% (target tidak

tercapai), yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

3.1. Camat

3.1.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalinnya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.

3.1.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain keterbatasan waktu dalam Pelaksanaan, waktu yang bersamaan dan sering terjadi gangguan server, pemadaman Listrik, dan jaringan internet yang tidak normal. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa belum maksimal, perlu dilakukan pelatihan/peningkatan wawasan untuk setiap sumber daya manusia di Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang agar pelaksanaan kegiatan pemerintah Kecamatan Sungai Pinang berjalan dengan optimal.

3.2. Sekretaris Kecamatan

3.2.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalinnya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang sangat baik dan tersedianya sarana pendukung.

3.2.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen karena banyaknya dokumen-dokumen yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan sering terjadi gangguan server pada aplikasi dan pemadaman Listrik, internet yang tidak normal, akses yang jauh untuk memenuhi kelengkapan kegiatan, dan kurangnya Sumber Daya Manusia.

3.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

3.3.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalinnya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang sangat baik dan tersedianya sarana pendukung.

3.3.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan karena banyaknya dokumen-dokumen yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan sering terjadi gangguan server pada aplikasi dan pemadaman Listrik sehingga penginputan menjadi terkendala.

3.4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.4.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dan tersedianya sarana pendukung.

3.4.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan sering terjadi gangguan server pada aplikasi sehingga penginputan menjadi terkendala.

3.5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

3.5.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dan tersedianya sarana pendukung.

3.5.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan kurangnya SDM pendukung.

3.6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

3.6.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dan tersedianya sarana pendukung.

3.6.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain Akses jalan yang kurang baik dan kurangnya Sumber Daya Manusia pendukung membuat terkendalanya koordinasi dengan pemerintah desa.

3.7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.7.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dan tersedianya sarana pendukung.

3.7.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain Akses jalan yang kurang baik dan kurangnya Sumber Daya Manusia pendukung

3.8. Kepala Seksi Pemerintahan

3.8.1. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan adalah terjalinnya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dan tersedianya sarana pendukung.

3.8.2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran antara lain Akses jalan yang kurang baik, kurangnya Sumber Daya Manusia pendukung, dan jadwal kegiatan yang bersamaan.

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	6	7	4	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	96,67	126%	-	-	N/A
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	76	77,32	102%	2.344.008.048	2.022.727.758	86%
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	50	50	100%	4.039.600	3.329.000	82%
4	Perencanaan dan penganggran perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100%	354.800	35400000%	100%
5	Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	900.000	200.000	22%
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	50	100%	1.843.220.928	1.238.206.657	67%
7	Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100%	1.811.216.128	1.216.651.657	67%
8	Penatalaksanaan verifikasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan /verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	31.130.000	28.920.250	93%
9	Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	874.800	424.000	48%
10	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	50	50	100%	9.648.800	6.948.000	72%
11	Penatausahaan BMD perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yng tersusun	4	4	100%	9.000.000	6.600.000	73%
12	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	50	50	100%	10.770.000	9.380.000	87%
13	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	0	0%	700.000	0	0%
14	ASN yang meningkat kompetensinya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	30	30	100%	10.000.000	9.380.000	94%
15	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	50	100%	138.175.800	113.151.194	82%
16	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	11.750.000	10.769.000	92%
17	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100%	2.763.300	2.321.500	84%
18	Kunjungan tamu yang terfasilitasi	Difasiliatasinya kegiatan kunjungan tamu	0	0	0%	0	0	0%
19	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	12	240%	117.250.000	94.235.694	80%

20	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	50	50	100%	38.114.000	36.683.500	96%
21	Pengadaan peralatan mebelair sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah sarana dan prasarana Mebelair sesuai dengan kebutuhan	0	0	0%	0	0	0%
22	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	4	100%	38.114.000	36.683.500	96%
23	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	50	100%	201.028.920	163.729.125	81%
24	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100%	175.960.000	152.299.996	87%
25	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	50	50	100%	99.010.000	79.488.109	80%
26	Terlaksananya pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	12	400%	70.980.000	55.933.734	79%
27	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	1	100%	8.050.000	6.054.375	75%
28	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100%	19.980.000	17.500.000	88%
29	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan bidang sosial kemasyarakatan	50	50	100%	3.503.400	150.000	4%
30	Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	200%	3.503.400	150.000	4%
31	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50	50	100%	23.201.000	10.260.000	44%
32	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	4	400%	23.201.000	10.260.000	44%
33	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25	25	100%	44.723.500	19.352.500	43%
34	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	5	250%	8.038.500	7.372.500	92%
35	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	2	200%	36.685.000	11.980.000	33%
36	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	50	50	100%	48.881.900	45.912.000	94%
37	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	100%	40.524.900	39.792.000	98%
38	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	2	200%	8.357.000	6.120.000	73%
39	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	75	25	33%	4.773.000	0	0%
40	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang0Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang0 Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	2	200%	4.773.000	0	0%
41	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	50	50	100%	151.339.500	100.050.000	66%
42	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang0Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang0Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	0	0	0%	59.128.500	49.650.000	84%

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Terlaksana	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
43	Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Yang Terlaksana	Jumlah Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	2	200%	92.211.000	50.400.000	55%
44	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	50	100%	11.397.700	3.748.000	33%
45	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	100%	1.848.000	1.848.000	100%
46	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	0	0%	2.200.000	0	0%
47	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	0	0%	1.749.700	0	0%
48	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	0	0%	0	0	0%
49	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga yang di Fasilitasi	0	0	0%	0	0	0%
50	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	0	0%	3.700.000	0	0%

4. Rekomendasi Triwulan IV

Dari hasil capaian kinerja triwulan IV yang telah dilaksanakan, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Camat :
 - 1.1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan;
 - 1.2. Melakukan evaluasi secara periodik dan berjenjang kepada penanggung jawab kegiatan;
 - 1.3. Melakukan evaluasi kinerja ASN dan PTT untuk penilaian kinerja;
2. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Asset :
 - 2.1. Memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk memenuhi dan menyelesaikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
 - 2.2. menyiapkan bahan evaluasi periodik dan berjenjang bagi penanggung jawab kegiatan/Kasi;
 - 2.3. Melaksanakan koordinasi ke BPKPAD secara intens untuk meminimalisir kesalahan penatausahaan keuangan;
3. Subbag Umum dan kepegawaian :
 - 3.1. Agar mengidentifikasi kebutuhan kerumahtanggaan Kecamatan;
 - 3.2. Agar melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap kondisi sarana prasarana perkantoran;
 - 3.3. Membuat RAB kegiatan pemeliharaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung kantor;
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial :
 - 4.1. Mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - 4.2. Menginventarisir data-data yang terkait dengan kesejahteraan sosial;
5. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban :
 - 5.1. Melakukan pergeseran kegiatan yang tidak terealisasi Melakukan koordinasi dengan Pengurus FKUB Persiapan penyelenggaraan Pilkada;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :
 - 6.1. mengevaluasi kendala kegiatan yang sudah dilaksanakan ;
 - 6.2. Membuat perencanaan jadwal kegiatan secara komprehensif;

7. Kepala Seksi Pemerintahan :

- 7.1. Mengevaluasi kinerja Pemerintahan desa;
- 7.2. Mengevaluasi kendala kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- 7.3. Membuat perencanaan jadwal kegiatan secara komprehensif

5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

- 1. Kepada semua seksi dan sub bagian segera menyusun laporan kinerja masing-masing seksi dan subag sebagai bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2024;
- 2. Kepada semua karyawan segera menyusun laporan kinerja masingmasing individu sebagai bahan untuk data dukung SKP TW IV dan SKP Final tahunan;
- 3. Kepada sekretariat laksanakan penilaian kinerja pegawai untuk penetapan reward dan punishment.


BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan IV target kinerja yang tercapai ada 45 sasaran kinerja, target kinerja yang tidak tercapai ada 5 sasaran kinerja;
2. Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) pada Kecamatan Sungai Pinang pada tahun 2024 menunjukkan nilai 96,67;
3. Hasil penilaian Indeks Kepatuhan Kinerja Itern (IKKI) pada Kecamatan Sungai Pinang pada tahun 2024 menunjukkan nilai 77,32;

Camat Sungai Pinang,



Marwata, SE
NIP. 19690217 198903 1 003